

MENETAPKAN SASARAN BERBASIS WILAYAH DAN RUMAH TANGGA MENGUNAKAN DATA BDT, PODES, DAN SUSENAS

Elan Satriawan
Ketua Pokja, TNP2K

Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015



LATAR BELAKANG

- Berbagai indikator kemiskinan seperti P0, P1, ataupun P2 mengalami penurunan
- Dua *concern*: pelambatan penurunan dan variasi antar-wilayah
- Penjelasannya beberapa faktor: sebab natural, situasi makro, efektifitas kebijakan.
- Upaya penanggulangan kemiskinan perlu sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat/sector swasta.
- Pensasaran program diperlukan untuk memastikan efisiensi anggaran dan efektifitas program



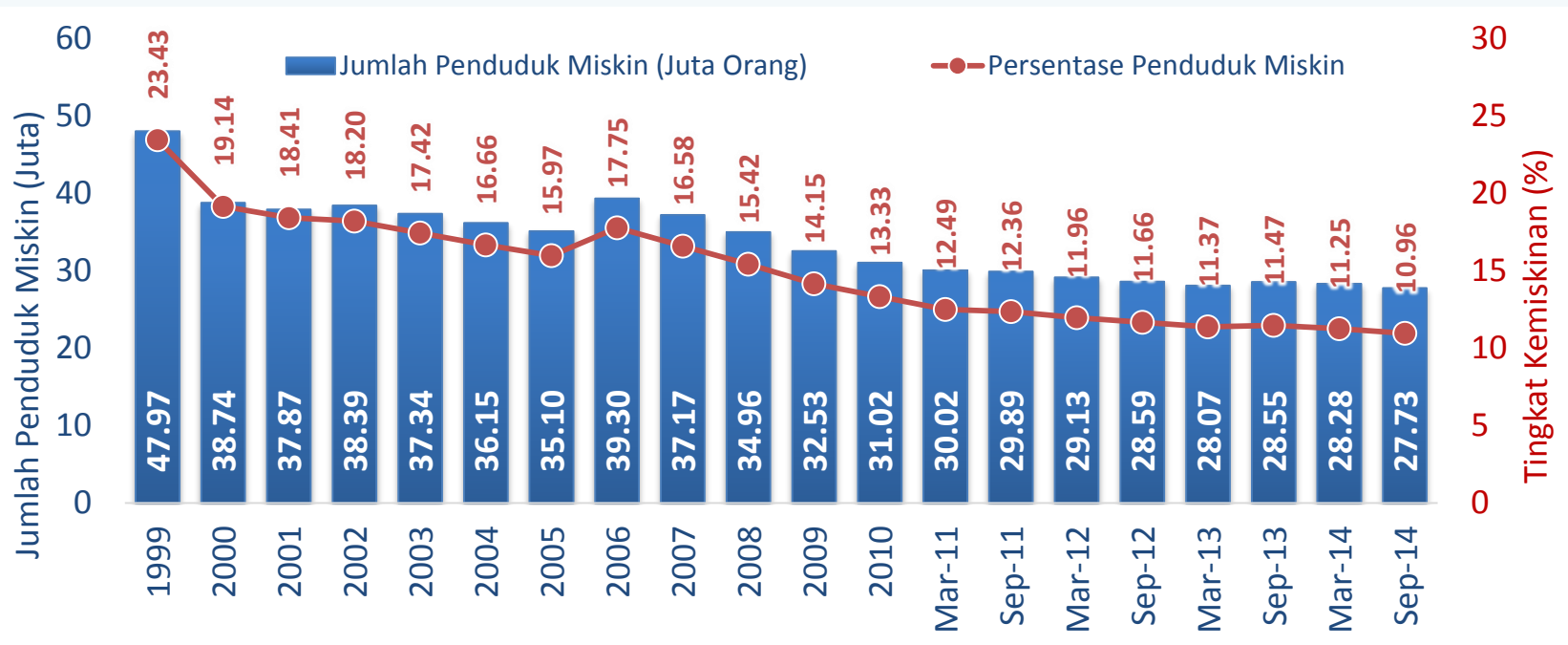
KERANGKA MATERI

1. Situasi Terkini Kemiskinan di Indonesia
2. Pendekatan Penentuan Rumah Tangga (Keluarga/Individu) Prioritas
3. Pendekatan Penentuan Wilayah Prioritas
4. Kesimpulan dan rekomendasi

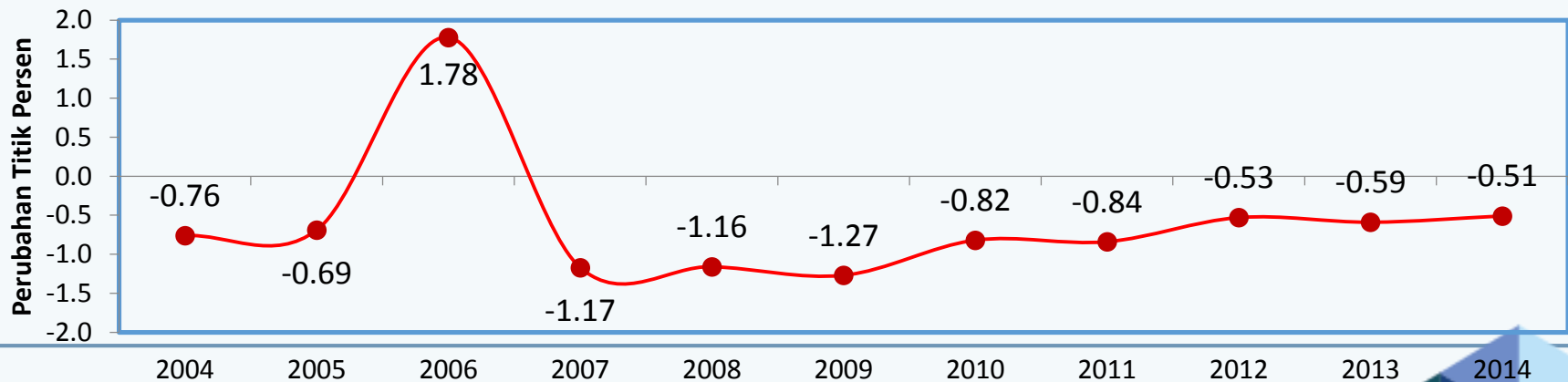


SITUASI TERKINI KEMISKINAN DI INDONESIA

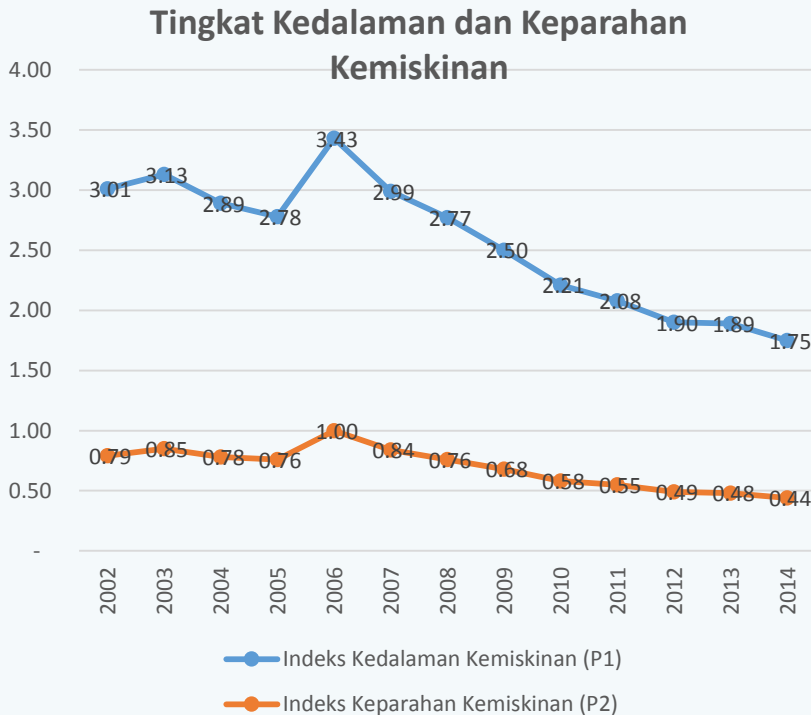
KEMISKINAN TERUS MENURUN NAMUN MENGALAMI PERLAMBATAN



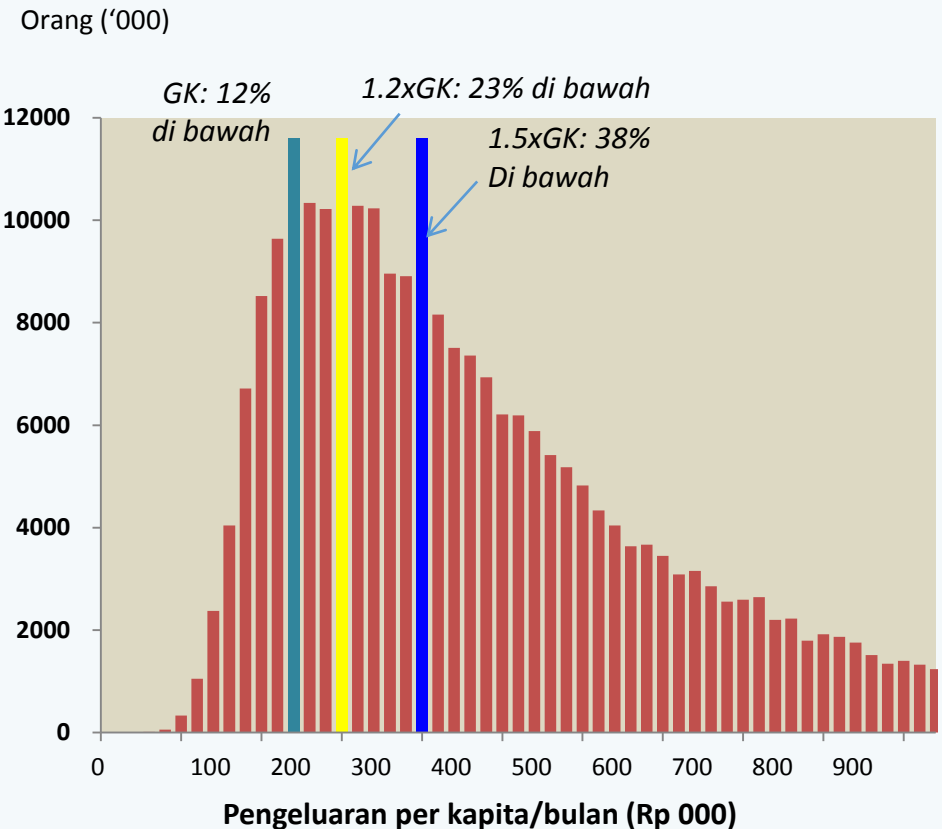
Perubahan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2004-2014



KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TERUS MENURUN, DENGAN TINGKAT KERENTANAN YANG MASIH TINGGI

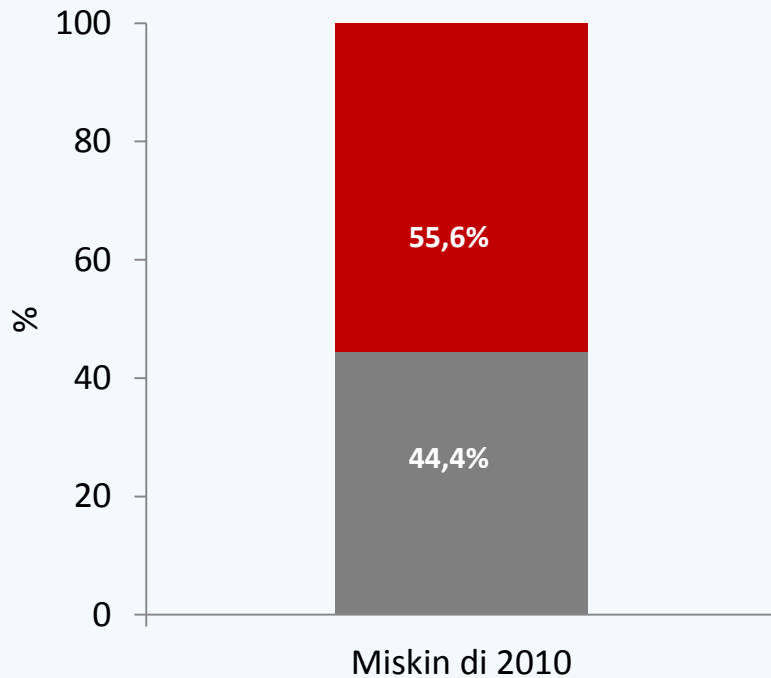


Distribusi Pengeluaran riil/Kapita, 2012



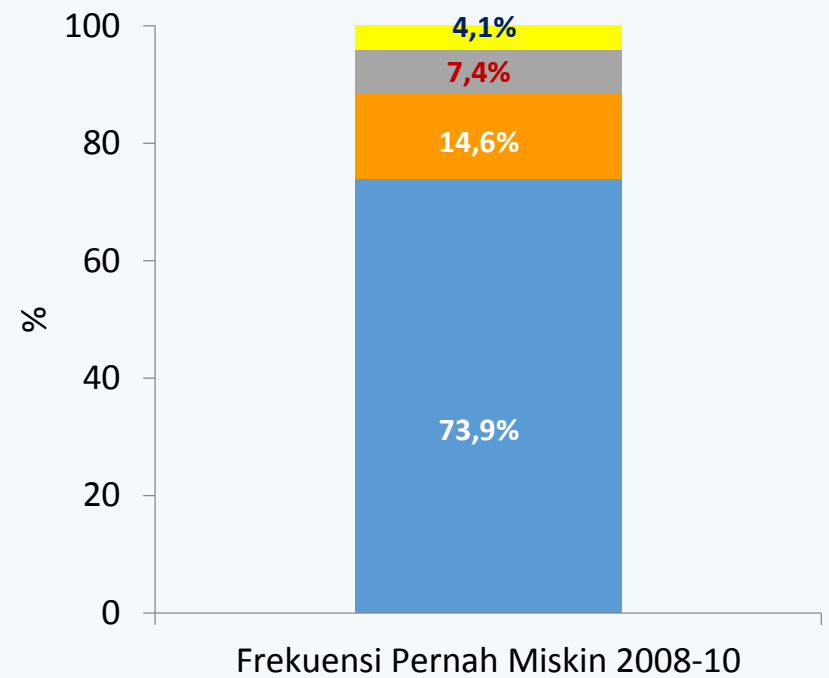
MEREKA YANG RENTAN MUDAH KELUAR MASUK KEMISKINAN

Pengelompokan Rumah Tangga Miskin di 2010



- Miskin Baru (Tidak Miskin di 2009)
- Miskin Sebelumnya (Sudah Miskin di 2009)

Frekuensi RT Mengalami Kemiskinan di 2008-10

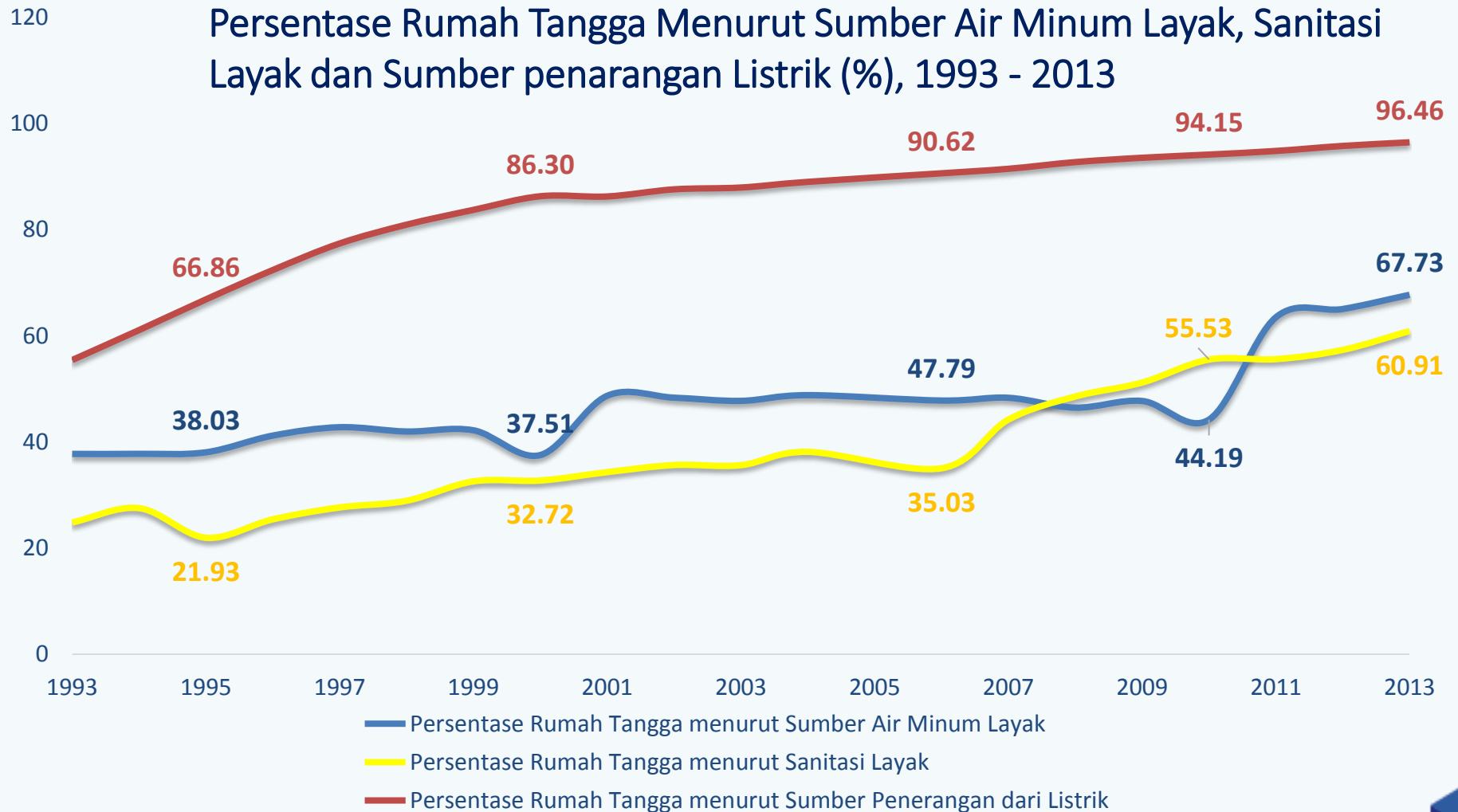


- Tidak Pernah Miskin
- Miskin Satu Kali
- Miskin Dua Kali
- Miskin Tiga Kali

Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia

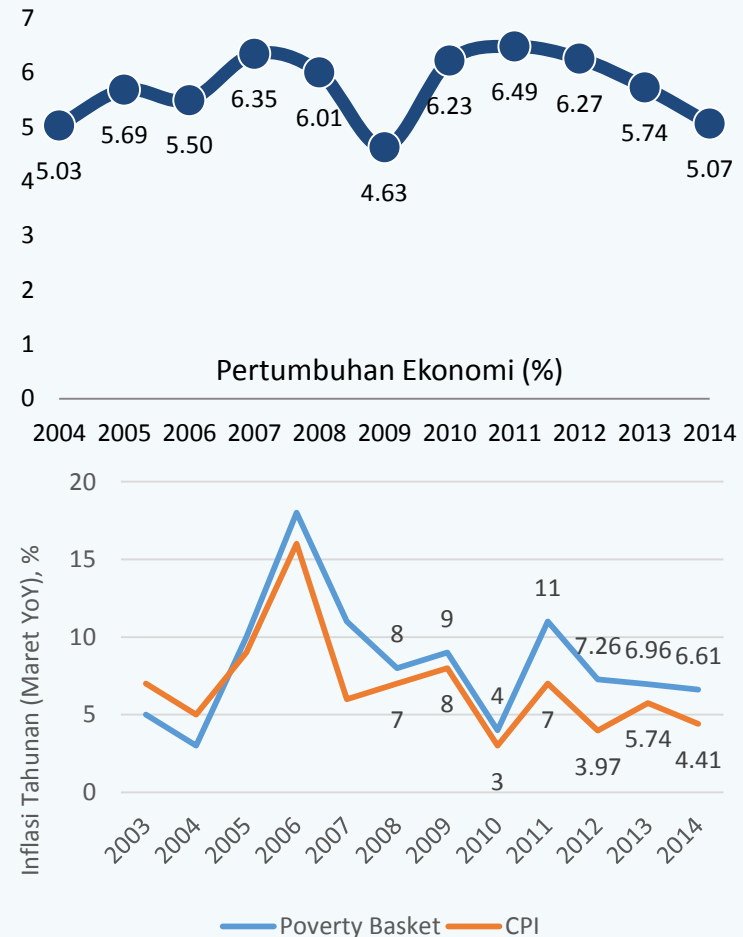
PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR MASIH RENDAH (KECUALI: LISTRIK)

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak, Sanitasi Layak dan Sumber penerangan Listrik (%), 1993 - 2013



PENTINGNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA

- Pertumbuhan ekonomi penting: ketika ekonomi tumbuh, kemiskinan turun
- Stabilitas harga perlu dijaga: khususnya komoditas yang dikonsumsi oleh kelompok miskin agar daya beli mereka tidak tergerus



Namun, sebagian populasi tetap akan rentan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang disasarkan kepada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan



BDT DAN PENSASARAN PROGRAM BERBASIS RUMAH TANGGA/KELUARGA/INDIVIDU

Perbedaan Data Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Basis Data Terpadu (BDT)

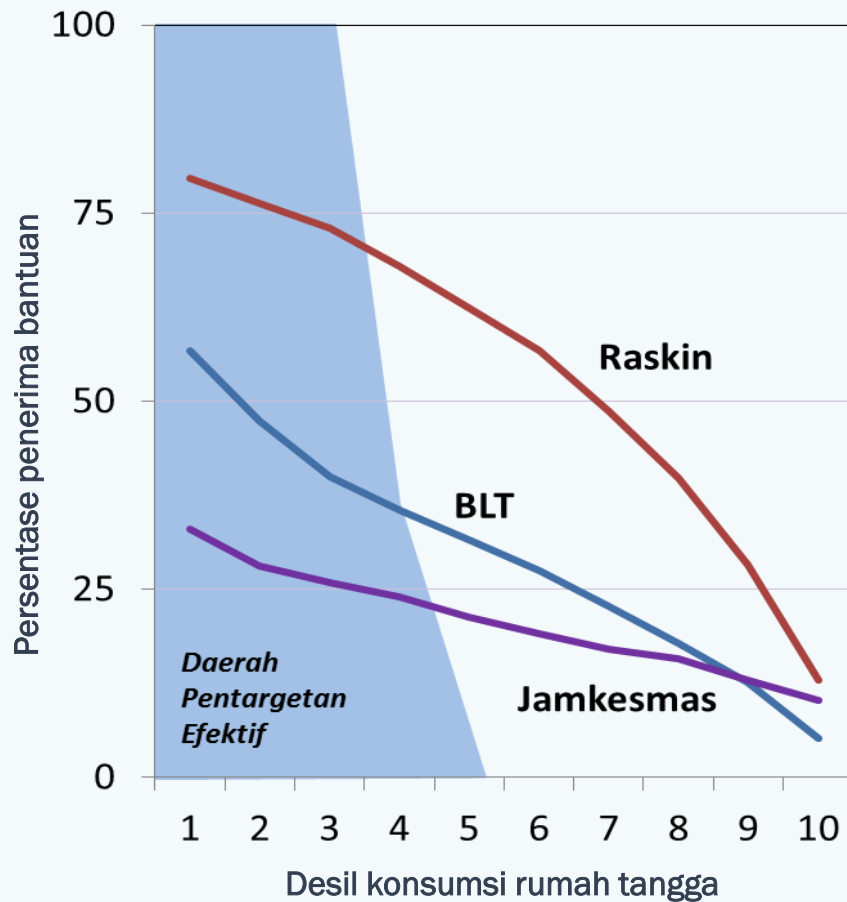
Agregat (Susenas)

- **Susenas** digunakan untuk mendapatkan **angka/tingkat kemiskinan** → proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk.
- Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).
- Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan.
- Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK).

Basis Data Terpadu

- Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan **data mikro** yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh **data berdasarkan nama dan alamat** dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan **bukanlah basis data kemiskinan**.
- Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

Efektivitas Penargetan Rumah Tangga/ Individu Prioritas Program Perlindungan Sosial



Sumber: Susenas 2009

Hanya sekitar **30%** penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)



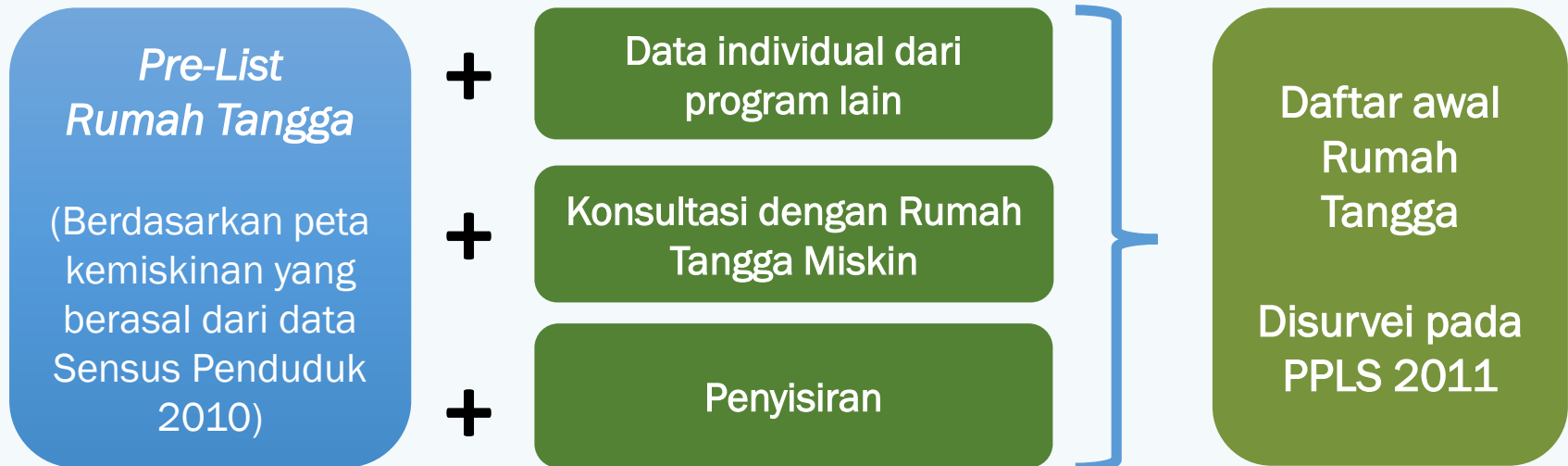
Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan

Perbaikan Metode Pengumpulan Data PPLS 2011

Tujuan: menurunkan *inclusion* dan *exclusion error*

	Miskin	Tidak miskin
Menerima bantuan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <i>Inclusion Error</i>
Tidak menerima bantuan	<input type="checkbox"/> <i>Exclusion Error</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

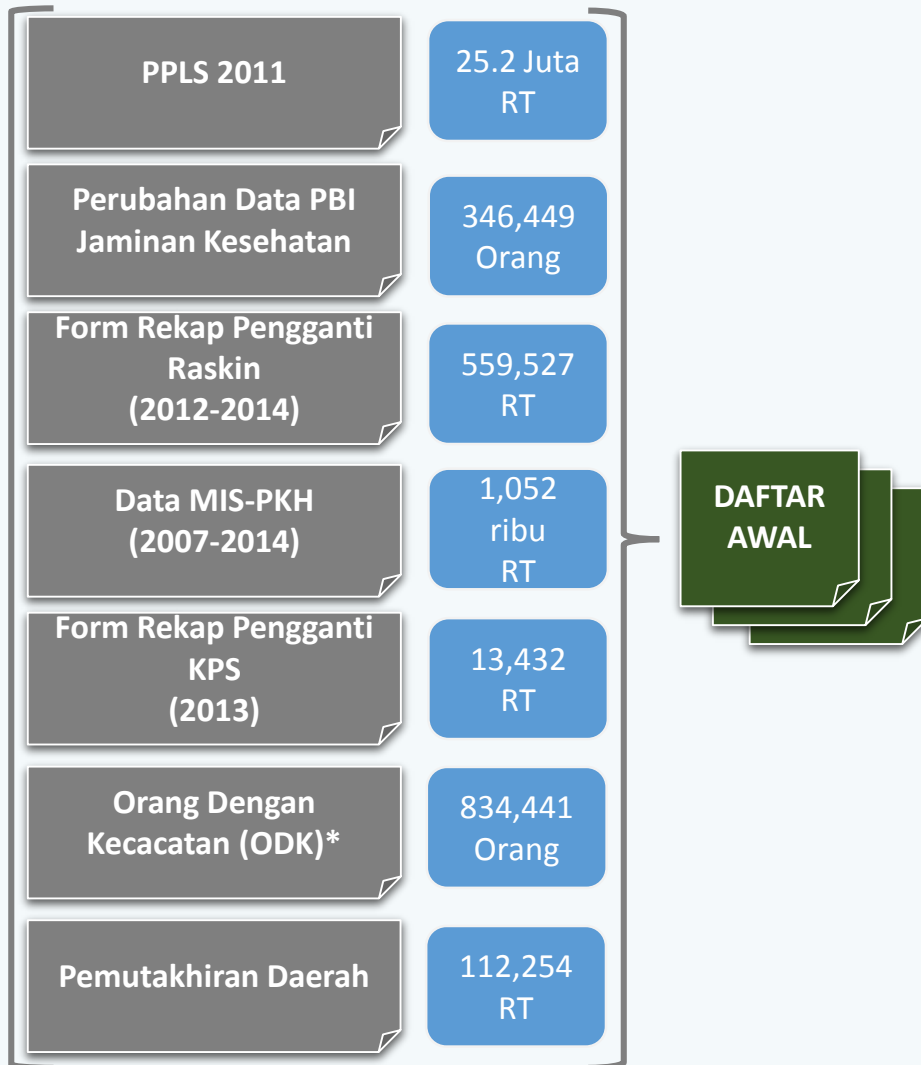
Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga



Mekanisme Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015



Persiapan Daftar Awal PBDDT 2015



- Penyusunan daftar rumah tangga sementara berdasarkan pemanfaatan dan pemutakhiran data pelaksanaan program sampai dengan saat ini yang mencakup \pm 28,1 Juta Rumah Tangga
- Kesetaraan informasi menjadi kriteria utama apakah data program dapat menjadi bagian dari daftar awal rumah tangga
- Daftar rumah tangga sementara merupakan input utama pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) untuk menetapkan rumah tangga sasaran pendataan

*Peserta Program Kementerian Sosial

Peran Penting Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Pemutakhiran BDT

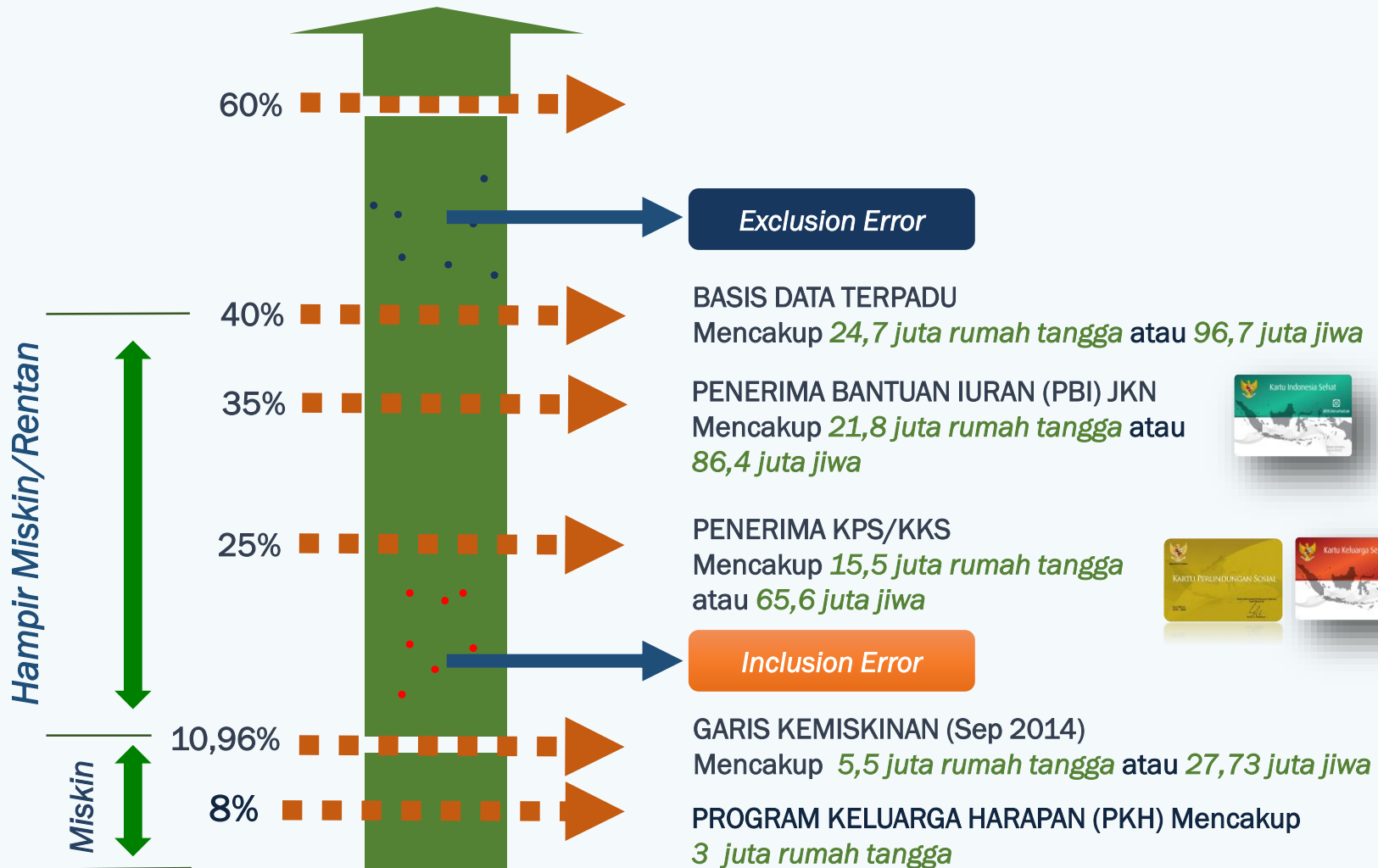


- 1 Mengakomodasi usulan masyarakat untuk menyempurnakan ketepatan sasaran BDT
- 2 Meningkatkan peran serta dan keterlibatan pemerintah daerah
- 3 Menyempurnakan ketepatan sasaran BDT melalui peningkatan cakupan pendataan dan perangkungan

Konsultasi publik telah diuji oleh TNP2K dengan hasil:

- Pemerintah daerah dan masyarakat antusias berpartisipasi
- Pemutakhiran daftar awal menjadi kunci dalam peningkatan kualitas PBDT, terutama:
 - ✓ Penjangkauan rumah tangga miskin yang belum terdaftar (*Exclusion Error*)
 - ✓ Penandaan rumah tangga kaya yang terdaftar (*Inclusion Error*)
 - ✓ Kriteria tetap dan mudah dipahami dalam usulan penambahan (*exclusion error*):
“ usulan tambahan rumah tangga diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga: keterbatasan fisik/mental; berpenyakit kronis; beban ketergantungan tinggi”

Persentase Penduduk Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi yang Hampir Sama



Pemanfaatan Basis Data Terpadu

**Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial**

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

**Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial**

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Jamkesmas

Subsidi
Siswa
Miskin

Program
Keluarga
Harapan

Raskin

*Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga **SASARAN**
masing-masing program*

**Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga**

3 Jenis Data Basis Data Terpadu

Data Agregat/Distribusi tingkat Kecamatan

- Untuk keperluan perencanaan program
- Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah
- Dapat diakses melalui website TNP2K
<http://bdt.tnp2k.go.id/>

Data Individu TANPA Nama & Alamat

- Untuk tujuan analisis atau perencanaan
- Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, NGO, dll
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal penelitian bila untuk penelitian)
<http://dataterpadu@tnp2k.go.id>

Data Individu DENGAN Nama & Alamat

- Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
- Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data)

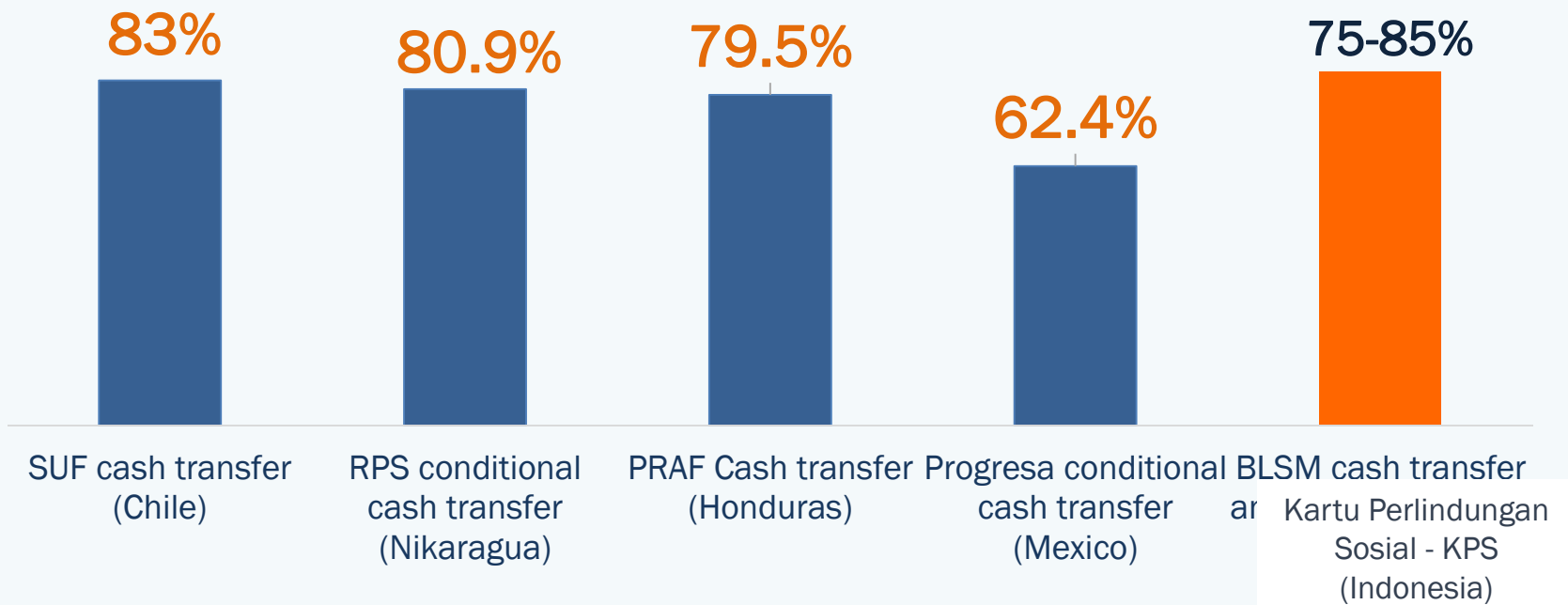
Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Program?



Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

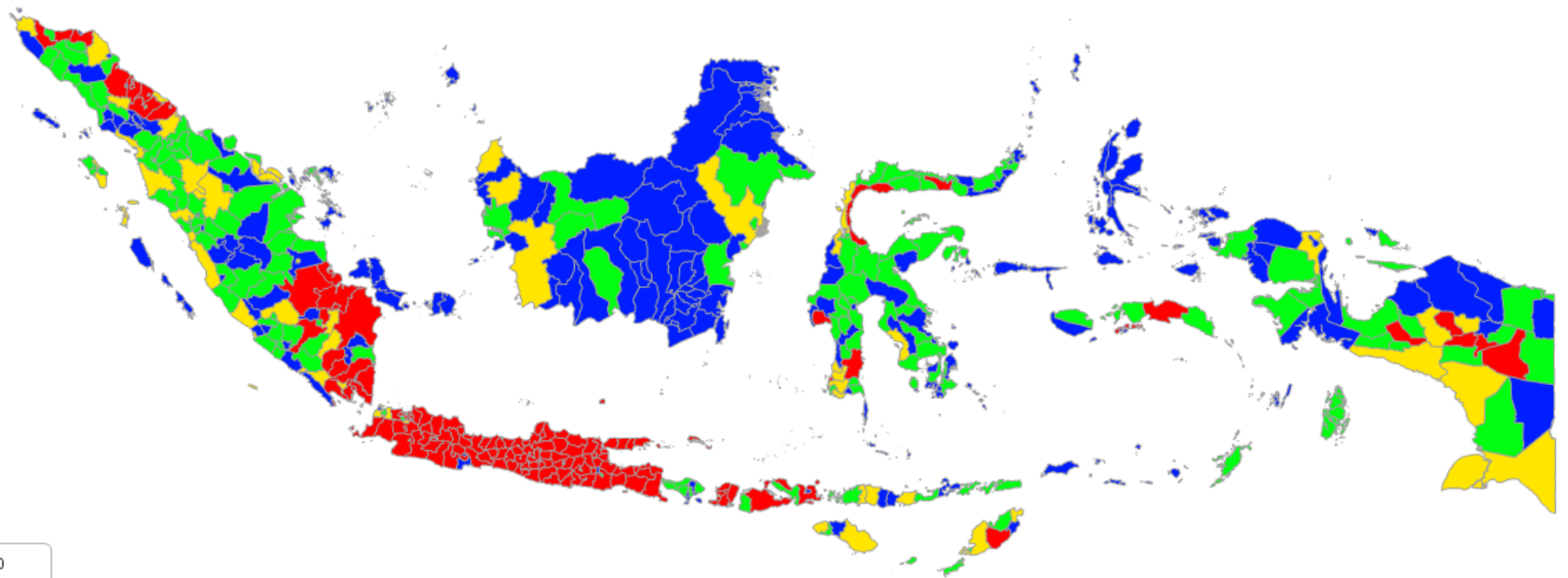
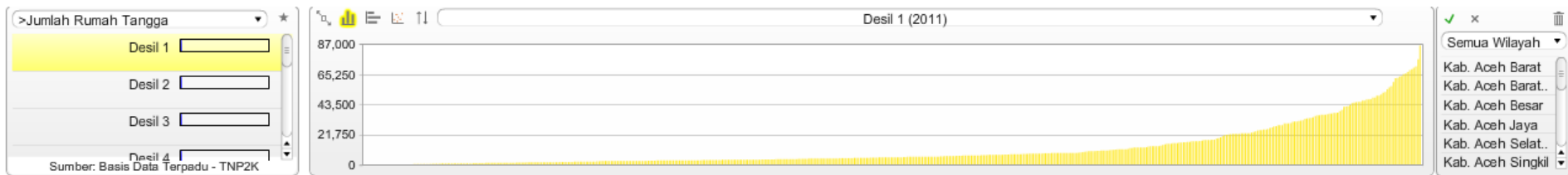
Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga

Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara



Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014

Penargetan Prioritas Rumah Tangga Desil 1 di Indonesia





PEMANFAATAN DATA UNTUK PENSASARAN BERBASIS WILAYAH

PENAJAMAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayah prioritas pada kantong-kantong kemiskinan (***Geographic Targeting of Poverty Alleviation Programs***)
2. Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal baru dalam program penanggulangan kemiskinan: IDT dan PNPM.
3. Pensasaran wilayah mensasar program didasarkan atas karakteristik/kondisi suatu wilayah –misalnya menyangkut tingkat kemiskinan, akses/transportasi, jumlah faskes/fasdik, dan lainnya
4. Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperhatikan ciri multidimensi dari masalah kemiskinan

Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakteristik wilayah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan.

Mengapa Pensasaran Wilayah?

1. Kemiskinan yang terkonsentrasi

- Masyarakat miskin dapat terkonsentrasi dan merata tinggal dalam suatu wilayah tertentu → kriteria pensasaran jumlah/persentase orang miskin atau pemegang KKS/KPS

2. Mengatasi ketertinggalan, keterisolasian wilayah

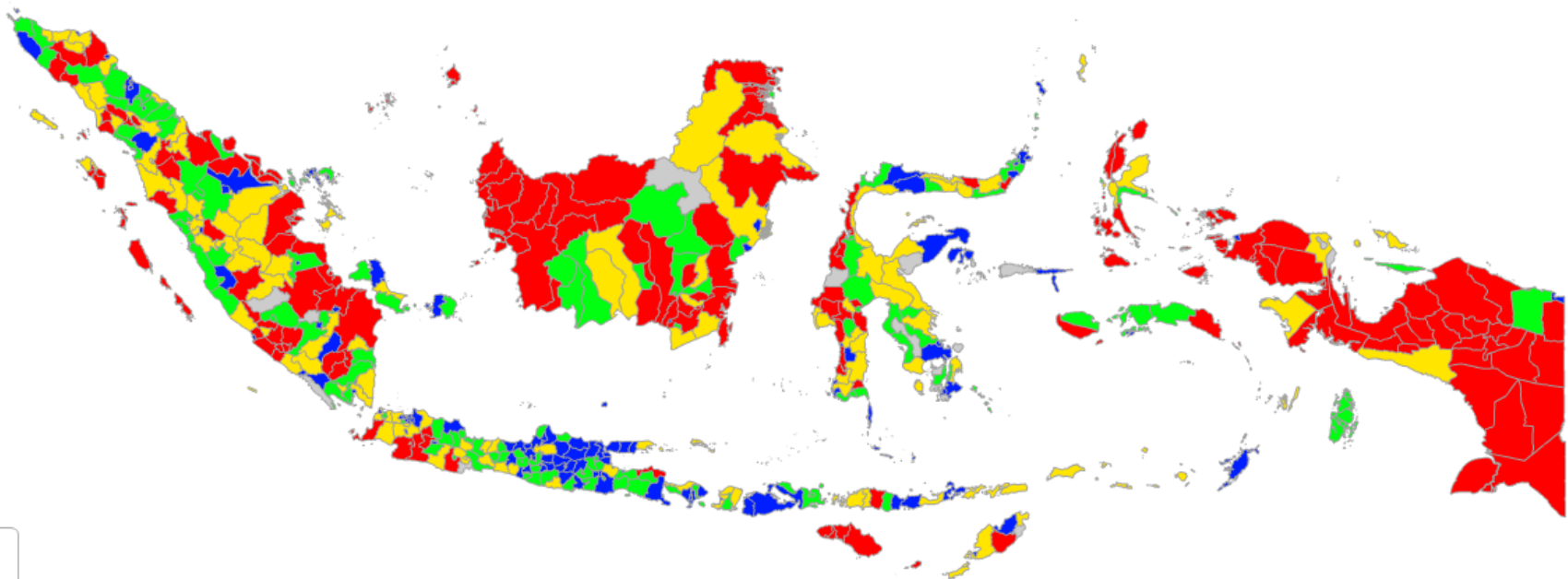
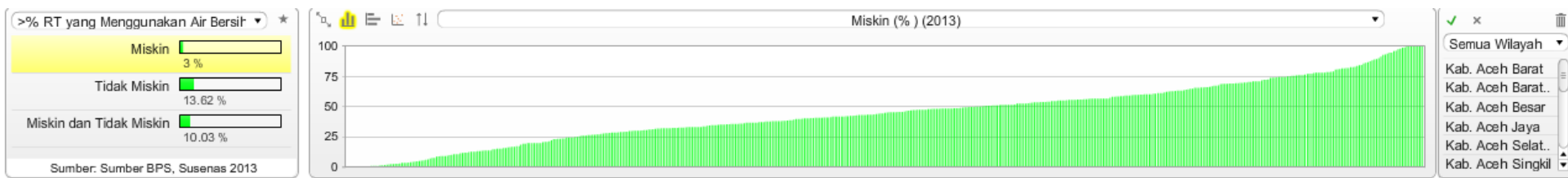
- Permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan minimnya akses pada layanan dasar dan infrastruktur → kriteria dapat berupa ketersediaan layanan dasar/infrastruktur atau jarak untuk mencapainya

3. Mainstreaming penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan sektoral dan wilayah

- Pembangunan sektoral atau wilayah seringkali hanya mengutamakan pertimbangan ekonomi, mainstreaming dapat dilakukan untuk makin mendorong sinergi kebijakan/program untuk penanggulangan kemiskinan

4. Ketiadaan data pensasaran berbasis rumah tangga

Penargetan Wilayah Prioritas Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Akses pada Air Bersih di Indonesia



Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015



KESIMPULAN

1. Program perlindungan sosial dilaksanakan untuk dua tujuan utama: (i) melindungi masyarakat miskin dan rentan dari guncangan, (ii) meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan pada layanan dasar.
2. Pensasaran program yang akurat berdasarkan rumah tangga/keluarga dan wilayah diperlukan untuk efisiensi anggaran dan efektifitas program.
3. Basis Data Terpadu Bisa dan sumber data yang relevan dapat dimanfaatkan untuk (1) Mengidentifikasi sumber permasalahan kemiskinan, (2) Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, (3) Menentukan penerima manfaat (siapa, lokasi, dll), dan (4) Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah



TERIMA KASIH